



RENCANA STRATEGIS PERIODE TAHUN 2025-2029



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN NUNUKAN**

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Nomor :2025

Tanggal : 2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur senantiasa kami panjatkan Kahadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas petunjuk dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 s/d 2029 dapat diselesaikan dengan baik.

Sejalan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah. Pemberian Kewenangan tersebut tidak semata-mata pelimpahan kekuasaan saja, tetapi juga adanya perubahan Pola Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, Sebagai konsekuensinya Pemerintah Daerah harus memperhatikan satu aspek yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka menjalankan fungsinya yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 s/d 2029 ini. Semoga dengan ditetapkannya RENSTRA ini akan memberikan kejelasan dan manfaat bagi perkembangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan semua pihak sebagai mitra kerja.

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN NUNUKAN**

SIRAJUDDIN, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19740321 200003 1 002

DAFTAR ISI

		<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		iii
DAFTAR TABEL		iv
DAFTAR GAMBAR		v
BAB I PENDAHULUAN		1
1.1 LATAR BELAKANG		1
1.2 LANDASAN HUKUM		3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN		5
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN		6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH.....		7
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....		7
2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH.....		13
2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....		15
2.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN.....		19
2.5 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN.....		20
2.6 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS		25
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....		28
3.1 TUJUAN dan SASARAN BPKAD.....		28
3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....		30
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....		36
4.1 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN.....		36
4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....		65
BAB V PENUTUP.....		68

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 2.1 ASN BPKAD Menurut Golongan dan Ruang	13
Tabel 2.2 ASN BPKAD Menurut Pendidikan Formal	14
Tabel 2.3 ASN BPKAD Menerut Eselon	14
Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana	15
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sesuai Tupoksi OPD dan Pencapaian Pelayanan Publik BPKAD	18
Tabel 2.6 Isu-Isu Stragis BPKAD.....	21
Tabel 2.7 Komparasi Sasaran RENSTRA BPKAD Kab. Nunukan terhadap Sasaran RENSTRA SKPD Provinsi Kaltara dan RENSTRA Kementerian Keuangan.....	22
Tabel 2.8 Analisa Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 s/d 2029 yang Menjadi Tanggung jawab BPKAD.....	24
Tabel 2.9 Tabel Kriteria Menyangkut Isu – Isu Strategis.....	25
Tabel 2.10 Nilai Isu Strategis Terhadap Skala Prioritas.....	25
Tabel 2.11 Perkalian Isu Strategis Terhadap Skala Prioritas.....	26
Tabel 2.12 Isu-isu Strategis.....	27
Tabel 3.1 Tujuan Dan Sasaran Bpkad Kabupaten Nunukan Periode 2025 S/D 2029.....	28
Tabel 3.2 Faktor-faktor Internal Berupa Kekuatan dan Kelemahan BPKAD.....	30
Tabel 3.3 Faktor-faktor Eksternal Berupa Peluang dan Ancaman BPKAD	31
Tabel 3.4 Matrik SWOT Dalam Rangka Penentuan Strategi.....	32
Tabel 3.5 Penahapan Renstra BPKAD	35
Tabel 3.6 Arah Kebijakan Renstra BPKAD.....	35
Tabel 4.2 Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan.....	37
Tabel 4.3 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Pendanaan.....	46
Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	63
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD.....	66
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) BPKAD.....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi..... 12

Gambar 3.1 Keterkaitan Sasaran dengan Strategi..... 34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau RENSTRA BPKAD Kabupaten Nunukan adalah sebuah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun periode perencanaan. Di dalam RENSTRA ini digambarkan dengan jelas tugas dan fungsi serta peran strategis BPKAD Kabupaten Nunukan di dalam pembangunan daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis baik internal sistem maupun eksternal organisasi. RENSTRA BPKAD disusun dengan berpedoman pada Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional menetapkan bahwa rencana pembangunan jangka Menengah Nasional merupakan penjabaran Visi, Misi dan program Presiden selama 5 (lima) Tahun ditempuh melalui strategi pokok yang dijabarkan dalam agenda pembangunan Nasional, memuat sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan dan program pembangunan. RENSTRA juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja atau RENJA SKPD dan menjadi pedoman bagi penilaian kinerja instansi pemerintah oleh lembaga audit baik internal ataupun eksternal. RENSTRA ini dibuat berdasarkan kondisi riil organisasi dengan dinamika, permasalahan dan perkembangan yang terjadi.

RENSTRA disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang nantinya akan ditetapkan sebagai kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam sebuah Peraturan Daerah. Kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD setiap tahunnya yang disusun berdasarkan RENJA SKPD dengan memuat kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD. Hal ini nantinya akan berdampak pada sinkronisasi antara kebijakan, program dan kegiatan pada RENJA dengan RENSTRA dan RKPD dalam rangka keberlanjutan pelaksanaan prioritas program pembangunan periode RPJMD Tahun 2025 s/d 2029.

Perencanaan Strategis adalah suatu proses yang akan memutuskan program apa yang akan dijalankan oleh suatu organisasi perangkat daerah serta berapa jumlah sumber daya yang akan dialokasikan pada setiap program untuk beberapa tahun mendatang. Perumusan strategis adalah proses memutuskan strategi baru, sedangkan perencanaan strategis adalah proses mengimplementasikan strategi. Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Nunukan dirumuskan dan disusun berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Nunukan Periode Tahun 2025 s/d 2029, Tupoksi BPKAD Kabupaten Nunukan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mengemban tugas dalam hal mengelola keuangan dan aset pemerintah daerah. RENSTRA BPKAD Kabupaten Nunukan juga dibuat dengan memperhatikan aspirasi dan isu yang berkembang serta berbagai Kebijakan Pemerintah yang akan dilaksanakan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Nunukan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nunukan, BPKAD melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sehubungan dengan itu maka BPKAD Kabupaten Nunukan berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis berdasarkan skala prioritas kegiatan pembangunan yang dapat direalisasikan sesuai dengan potensi dan kemampuan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Nunukan serta tetap memperhatikan kebijakan dari Kabupaten yang disertai kekuasaan atas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Sinkronisasi RENSTRA SKPD dengan RENSTRA Provinsi dan Kementerian/Lembaga juga harus dilakukan, untuk itu RENSTRA BPKAD Kabupaten Nunukan juga merujuk pada RENSTRA BKAD Provinsi Kalimantan Utara dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kinerja BPKAD Kabupaten Nunukan yang akan diukur setiap tahun dengan Indikator kinerja yaitu Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD. Dimana Opini BPK ini terbagi kedalam 4 (empat) skala yakni :

- Skala 1 : Tidak wajar (*Adverse*)
- Skala 2 : Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer*)
- Skala 3 : Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified*)

- Skala 4 : Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified*)

Dalam hal ini Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan adalah WTP (Skala 4), Kabupaten Nunukan tercatat telah menerima 9 (sembilan) kali perolehan WTP secara berturut-turut hingga tahun 2024. Dengan demikian telah terjadi sinkronisasi antara RENSTRA BKAD Provinsi Kalimantan Utara dan RENSTRA Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan RENSTRA BPKAD Kabupaten Nunukan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun Undang – undang dan peraturan yang mendasari pembuatan dan pelaksanaan RENSTRA SKPD adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kalidengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 13. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 14. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1781);
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan;
 17. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan dokumen RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan yaitu menyusun dokumen yang digunakan sebagai dasar perencanaan yang merupakan titik awal untuk melakukan pengukuran kinerja BPKAD Kabupaten Nunukan dan digunakan untuk mengarahkan dan menyelaraskan seluruh dimensi kebijakan pembangunan daerah, khususnya pada aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama periode lima tahun (2025 s/d 2029), sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal oleh BPKAD setiap tahunnya, guna mendukung terwujudnya indikator kinerja dari sasaran daerah yang menjadi tanggungjawab BPKAD beserta indikator kinerja utama BPKAD sebagai bentuk tolak ukur pertanggungjawaban kepala BPKAD sebagai pengembal amanah kepada Bupati Nunukan sebagai pemberi amanah.

Dokumen RENSTRA BPKAD Tahun 2025 s/d 2029 memiliki tujuan yaitu sebagai berikut :

1. Sebagai dasar/acuan penyusunan kebijakan lima tahunan BPKAD untuk mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan, program pembangunan dan sasaran program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dan bersinergis dengan visi, misi, tujuan dan indikator kinerja dari sasaran strategis BPKAD;
2. Sebagai pedoman dalam merumuskan program dan kegiatan beserta kerangka kebutuhan pendanaan pada bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Sebagai pedoman dan alat kendali kinerja dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka evaluasi atas kinerja pelayanan BPKAD terhadap capaian target indikator kinerja setiap tahun dalam kurun tahun 2025 s/d 2029;
4. Sebagai dasar penyusunan dokumen perjanjian kinerja/kesepakatan kinerja Kepala BPKAD untuk mewujudkan target kinerja dari indikator Utama (IKU) yang diperjanjikan dalam periode tersebut; dan
5. Sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh BPKAD pada bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 s/d 2029 sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANASET DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan
- 2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPKAD
- 2.6 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi rumusan pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah, strategi dan kebijakan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien

**BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini menguraikan tentang rencana program, kegiatan dan Subkegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana telah dirumuskan, Bab ini juga akan menguraikan tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai bentuk komitmen pencapaian tujuan dan sasaran.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman

pembangunan lima tahun kedepan oleh Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan memiliki Tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nunukan dipimpin oleh Seorang Kepala Badan yang membawahi 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang di dalam struktur organisasinya. Penjabaran mengenai tugas dan fungsi setiap komponen kepemimpinan yang ada di BPKAD adalah sebagai :

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang-bidang serta memberikan pelayanan administratif dan pertimbangan teknis kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan BPKAD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas di atas, sekretariat mempunyai

fungsi:

- a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional kesekretariatan;
- b. pengoordinasian kegiatan yang terdiri dari:
 1. kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 2. kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
 3. kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
 4. kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
 5. kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
 6. kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
 7. kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah; dan
 8. kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.
- c. Merumuskan bahan penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Badan;
- d. Merumuskan bahan pembinaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan;
- e. Perumusan bahan dan mengendalikan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Badan, pembukuan, verifikasi dan perbendaharaan di lingkungan Badan;
- f. Pengoordinasian dukungan dan pelayanan administratif serta pertimbangan teknis bagi pelaksanaan tugas bidang/unit kerja di lingkungan Badan;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan ganti rugi di lingkungan Badan;
- h. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan Pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

2. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dibidang perencanaan anggaran, pelaksanaan dan evaluasi anggaran serta pengolahan data dan informasi keuangan.

Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan pada Bidang Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di bidang anggaran;
- b. pengoordinasian kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri dari:
 1. sub kegiatan koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS;
 2. sub kegiatan koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS;
 3. sub kegiatan koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD;
 4. sub kegiatan koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan RKA-SKPD;
 5. sub kegiatan koordinasi, penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD;
 6. sub kegiatan koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan DPA-SKPD;
 7. sub kegiatan koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD;
 8. sub kegiatan koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD;
 9. sub kegiatan koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran;
 10. sub kegiatan koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah;
 11. sub kegiatan koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan;
 12. sub kegiatan pembinaan penganggaran daerah pemerintah kabupaten/kota; dan
 13. kegiatan pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah.
- c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- d. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

3. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, di bidang Perbendaharaan dan Kas

Daerah, penerimaan kas daerah dan pengeluaran kas daerah. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, bidang perbendaharaan memiliki fungsi :

- a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di bidang perbendaharaan dan kas daerah;
- b. pengoordinasian kegiatan yang terdiri dari:
 1. kegiatan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah; dan
 2. kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah.
- c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- d. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

4. Bidang Aset

Bidang Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Kepala Bidang Aset mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Aset menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di bidang aset; dan
- b. pengoordinasian program pengelolaan barang milik daerah;
- c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- d. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya .

5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

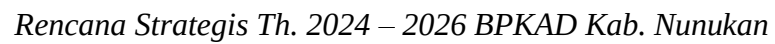
Bidang Akuntansi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan perencanaan,

perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Akuntansi dan Pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di bidang akuntansi;
- b. pengoordinasian kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
- c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- d. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Selanjutnya uraian tugas dari masing-masing pejabat sesuai susunan organisasi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan seperti yang tercantum dalam Gambar 2.1 berikut:

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 39 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-BADAN
DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**



2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nunukan, maka diperlukan adanya dukungan baik berupa Sumber Daya Manusia (SDM) maupun sarana dan prasarananya. Adapun sumber daya yang dimiliki tersebut adalah sebagai berikut :

1. Data Kepegawaian

Berdasarkan data kepegawaian per 31 Desember 2024 ASN di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nunukan berjumlah 52 (lima puluh dua) Orang dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan, hal tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan golongan/ruang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

ASN BPKAD menurut Golongan dan Ruang

NO.	Golongan/Ruang	Jumlah (org)
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2	Pembina Tingkat I (IV/b)	1
3	Pembina (IV/a)	7
4	Penata Tingkat I (III/d)	5
5	Penata (III/c)	2
6	Penata Muda Tingkat I (III/b)	3
7	Penata Muda (III/a)	9
8	Pengatur Tingkat I (II/d)	3
7	Pengatur (II/c)	11
8	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	1
	JUMLAH	44

(Data per 31 Desember 2024)

- b. Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan latar belakang pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 ASN BPKAD Menurut Pendidikan Formal		
No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (org)
1	S – 3 (Doctoral)	-
2	S – 2 (Pasca Sarjana)	6
3	S – 1 (Sarjana)	28
4	D – 3 (Diploma 3)	6
5	SMA	12
	JUMLAH	52

(Data per 31 Desember 2024)

c. Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Esselon adalah sebadai berikut :

Tabel 2.3 ASN BPKAD menurut eselon		
No.	Eselonisasi	Jumlah (orang)
1	Kepala Badan (Eselon II/b)	1
2	Sekretaris (Eselon III/a)	1
3	Kepala Bidang (Eselon III/b)	4
4	Kepala Sub Bagian (Eselon IV/a)	8
	JUMLAH	14

(Data per 31 Desember 2024)

d. Sarana Dan Prasarana

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan serta program dan kegiatan yang dilaksanakan maka Kantor BPKAD Kabupaten Nunukan dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang kenyamanan kerja yang menganut azas ergonomis, menuju pada konsep hemat kertas (*paperless office*) dan ramah lingkungan. Sarpras tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.4 dibawah ini :

Tabel 2.4
Sarana dan prasarana

No.	Klasifikasi	Jumlah Unit	Nilai (Rp)
1.	Tanah	1	1.527.000.000,00
2.	Peralatan dan Mesin	2.137	14.701.520.264,72
3.	Gedung dan Bangunan	12	13.371.998.705,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	29	10.304.263.939,00
5.	Aset Tetap Lainnya	127	14.295.215,00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	0,00
7.	Aset Lainnya	-	0,00
	Jumlah		39.919.078.123,72

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nunukan adalah merupakan salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan daerah dan aset/barang milik daerah sesuai dengan pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset/barang milik daerah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset/barang milik daerah Kabupaten Nunukan. Sebagaimana telah dibahas pada sub bab diatas bahwa BPKAD sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan sesuai urusan pemerintahan dan tugas pokok serta fungsi yang ditangani adalah pada sektor pengelolaan keuangan dan aset/barang milik daerah berdasarkan pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun sistem pengelolaan keuangan daerah mulai dari penganggaran sampai dengan pelaporan, dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Penganggaran

Penyusunan anggaran dimulai dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD yang disusun berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. RKA-SKPD yang telah sesuai dengan KUA/PPAS dientry kedalam aplikasi penganggaran (SIPD) sebagai bahan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). RAPBD yang telah disusun disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan dan persetujuan bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.

b. Pelaksanaan

Berdasarkan APBD yang telah ditetapkan dilanjutkan dengan penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, selanjutnya berdasarkan DPA-SKPD, diterbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) berdasarkan Anggaran Kas masing-masing kegiatan yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

c. Penatausahaan dan Pelaporan

Berdasarkan SPD, SKPD menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Selanjutnya berdasarkan SP2D, SKPD mencairkan dana pada Bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan yakni Bank Kaltimara Cabang Nunukan. Secara umum proses penganggaran sampai dengan pelaporan sudah menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah).

Selain Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga diberi amanah untuk mengkoordinasikan, merumuskan, dan mengatur serta mengendalikan tugas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan di bidang penganggaran dan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pengendalian dan penghapusan aset daerah. Beberapa langkah dalam manajemen aset pemerintah daerah meliputi, inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, pemanfaatan aset dan kedepan akan dilakukan pengawasan dan pengendalian dengan sistem informasi geografis manajemen aset. Nilai aset yang dicantumkan dalam neraca daerah masih merupakan nilai historis/nilai buku, sehingga diperlukan penilaian dan sensus aset untuk mendapatkan nilai pasar dari seluruh aset yang dimiliki pemerintah daerah.

Penilaian yang tepat atas aset/barang daerah akan menggambarkan kekayaan pemerintah daerah yang sebenarnya dan mencerminkan kemampuan daerah secara utuh, menjadi lampiran yang akurat dalam Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan sebagai dasar pengelolaan aset/barang daerah selanjutnya. Pemanfaatan dan pengendalian aset tanah dan bangunan yang dimiliki/dikelola pemerintah daerah yang mempunyai nilai ekonomis menjadi perhatian serius, sebagai perwujudan atas pelayanan publik, pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Penatausahaan barang milik negara/daerah meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Barang milik negara/daerah yang berada di bawah penguasaan pengguna barang/kuasa pengguna barang harus dibukukan melalui proses pencatatan dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna oleh kuasa pengguna barang, Daftar Barang Pengguna oleh pengguna barang dan Daftar Barang Milik Negara/Daerah oleh pengelolaan barang. Proses inventarisasi, baik berupa pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik negara/daerah merupakan bagian dari penatausahaan. Hasil dari proses pembukuan dan inventarisasi diperlukan dalam melaksanakan proses pelaporan barang milik negara/daerah yang dilakukan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, dan pengelolaan barang. Hasil penatausahaan barang milik negara/daerah digunakan dalam rangka:

1. penyusunan neraca pemerintah pusat/daerah setiap tahun;
2. perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik negara/daerah setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran pengadaan barang daerah.

Berikut dapat dijabarkan dalam tabel capaian kinerja BPKAD periode 2019 s/d 2024:

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sesuai Tupoksi OPD dan
Pencapaian Pelayanan Publik BPKAD

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Indikator	Tahun Dasar (2019)	Target RENSTRA SKPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	20222	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
3	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Aset Daerah	100%	75%	77%	80%	82%	87%	90%	79%	81%	83%	88%	115%	1,03	1,01	1,01	1,01	1,28

Keberhasilan pencapaian pelaksanaan program kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan selama periode 2020-2024 sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel 2.5 tentunya tidak terlepas dari berbagai kelemahan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan koreksi dalam rangka peningkatan kualitas, penyempurnaan dan pengembangan pada masa yang akan datang, antara lain :

1. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, sedangkan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks ;
2. Masih adanya pegawai yang kurang disiplin dan kurang memahami etos kerja serta tanggung jawab terhadap tupoksi masing-masing;
3. Masih adanya pegawai yang kurang memahami peraturan perundang- undangan, utamanya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sehingga masih ada anggapan dan pola pikir dulu bisa dan tidak apa- apa kenapa sekarang tidak bisa;
4. Koordinasi dan komunikasi antar staf, antar bidang, dan antar SKPD masih belum dapat dilakukan lebih intens ;
5. Belum optimal pemanfaatan waktu dan kesempatan untuk mengikuti workshop, diklat, kursus dan bimtek baik formal ataupun informal karena intensitas dan ritme kerja di BPKAD yang relatif tinggi.

2.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Kelompok sasaran layanan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam tanggung jawab pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dijabarkan dalam dua program dan beberapa kegiatan/sub kegiatan yang layanannya akan meliputi layanan internal BPKAD Nunukan, OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, serta pihak lain yang terlibat dan berkepentingan terhadap pelaksanaan Tupoksi BPKAD.

2.5 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dipergunakan untuk menentukan isu-isu strategis terkait penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kewenangannya. Isu strategis merupakan suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang khususnya terselenggaranya pelayanan OPD. Kinerja pelayanan yang telah diselenggarakan sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD beserta berbagai permasalahan yang dihadapi selama tahun 2020-2024 sebagaimana telah dibahas sebelumnya, dari permasalahan-permasalahan tersebut dilakukan analisis untuk mengidentifikasi permasalahan yang mungkin terjadi pada periode berikutnya, dari analisis tersebut dapat diidentifikasi permasalahan sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat pada BPKAD Kabupaten Nunukan yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.6
Isu-Isu Stragis BPKAD

ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						
POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU YANG RELEVAN	ISU DINAMIS YANG RELEVAN			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Pengelolaan Keuangan Daerah	Kurang cermatnya OPD menyusun RKA dan anggaran kas sehingga sering terjadi usulan perubahan atau pergeseran anggaran kas yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan di OPD	Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Belum Berjalan Secara Optimal	Ketidak pastian perekonomian global akibat dari perang dagang	SIPD sampai saat ini masih sering mengalami masalah (<i>trouble</i>).	SIPD sampai saat ini masih sering mengalami masalah (<i>trouble</i>).	Penyusunan APBD dan Laporan Keuangan tepat waktu
	SDM pengelola keuangan di OPD belum seluruhnya memahami terhadap mekanisme perencanaan anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan			Sistem EBMD yang sampai saat ini belum berfungsi secara optimal		Mempertahankan capaian laporan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
	Belanja modal yang disusun pada APBD Murni oleh OPD masih banyak dilakukan penyerapan pada akhir tahun					Peningkatan penilaian MCP KPK terhadap pengelolaan BMD
	Masih banyak OPD yang melakukan realisasi anggaran belanja modal yang tidak sesuai dengan ketentuan tetapi tetap direalisasikan					Pengembangan SDM pejabat pengelola keuangan (penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan) melalui bimbingan teknis, rapat Koordinasi.
	Kurangnya koordinasi antara pengurus barang dengan PPTK, PPK SKPD, PPK, dan perencana terhadap realisasi Belanja					Peningkatan kapasitas SDM pengurus barang secara terus menerus dan berkelanjutan
	Masih adanya kesalahan penganggaran barang habis pakai atau belanja pemeliharaan namun dianggarkan di Belanja modal					Rekonsiliasi BMD setiap triwulan dan semester tepat waktu
	SDM pengurus barang di OPD belum seluruhnya kompeten sehingga mengakibatkan keterlambatan laporan rekonsiliasi barang	Belum dapat mewujudkan tata kelola Barang Milik Daerah yang baik				Penerbitan SP2D tepat waktu
	Masih banyak Tanah daerah yang belum bersertifikat					
	Penggunaan dan Penataan BMD belum optimal					

Selain beberapa permasalahan tersebut diatas, juga dapat digambarkan secara jelas dan lengkap mengenai kondisi di BPKAD Kabupaten Nunukan dimana pada saat ini ada beberapa kebijakan baru dari pemerintah pusat yang harus segera diakomodir, disosialisasikan dan diimplementasikan di Kabupaten Nunukan berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset di daerah. Permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Perlu adanya peningkatan pengetahuan teknologi informasi dalam pengelolaan Keuangan Daerah bagi pegawai BPKAD.
2. Pengelolaan dan pelaporan BMD yang sering terkendala dan terlambat sebagai salah satu data/dokumen utama dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan tepat waktu.

Selanjutnya akan dilakukan telaahan terhadap Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan Kementerian Keuangan RI dengan Renstra BPKAD Kabupaten Nunukan untuk melihat keterkaitan dan keselarasan dari masing-masing renstra tersebut agar sinergi bisa tercapai untuk mewujudkan pengelolaan keuang negara yang transparan dan akuntabel. Keselarasan dari renstra tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Komparasi Sasaran RENSTRA BPKAD Kab. Nunukan terhadap Sasaran RENSTRA SKPD Provinsi Kaltara dan RENSTRA Kementerian Keuangan

No.	Indikator Kinerja	Sasaran RENSTRA BPKAD Kabupaten Nunukan	Sasaran pada RENSTRA Provinsi Kalimantan Utara	Sasaran pada RENSTRA Kementerian Keuangan
1	Opini BPK RI	1. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah 2. Meningkatnya kinerja pengelolaan aset daerah	Peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan di BPKAD Provinsi Kalimantan Utara	Peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan Kementerian Keuangan

Dari komparasi capaian sasaran Renstra BPKAD Kabupaten Nunukan, BKAD Provinsi Kalimantan Utara dengan Kementerian Keuangan dengan indikator opini BPK atas laporan keuangan yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan jika opini BPK atas laporan keuangan tersebut bisa terus menerus dipertahankan pada opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Untuk mendukung pencapaian program-program pemerintah Kabupaten Nunukan yang menjadi kewenangan BPKAD maka dilakukan analisis atas kebijakan-kebijakan umum dan program-program yang ada sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel : 2.8

**Analisa Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 s/d 2029 yang Menjadi
Tanggung jawab BPKAD**

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program	Bidang Urusan
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	Meningkatnya kinerja pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah	a. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase kinerja pengelolaan keuangan daerah tepat waktu	WTP	WTP	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum
2	Meningkatnya kinerja pengelolaan Aset Daerah	Peningkatan Akuntabilitas Aset Daerah	b. Peningkatan Akuntabilitas Laporan Kinerja SKPD c. Peningkatan Legalisasi Aset Daerah	Prosentase kinerja administrasi pengelolaan Aset daerah			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	

2.6 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam menentukan Isu-isu strategis yang mungkin terjadi di suatu perangkat daerah maka terlebih dahulu ditentukan kriteria dari isu-isu strategis tersebut sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.9

Tabel Kriteria Menyangkut Isu – Isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
(1)	(2)	(3)
1	Memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah	30
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD	20
3	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	20
4	Dampak yang ditimbulkan terhadap SKPD	15
5	Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani	15
Total		100

Untuk menentukan nilai skala kriteria isu-isu strategis/program pada suatu SKPD perlu ditetapkan parameter penilaian dengan menggunakan skala linkert, Nilai bobot kriteria dikalikan nilai Skala prioritas, sebagai berikut:

- 1. Nilai 1 untuk skala tidak prioritas ;
- 2. Nilai 2 untuk skala kurang prioritas ;
- 3. Nilai 3 untuk skala cukup prioritas ;
- 4. Nilai 4 untuk skala prioritas;
- 5. Nilai 5 untuk skala sangat prioritas.

Tabel 2.10

Nilai Isu Strategis Terhadap Skala Prioritas

No	Isu Strategis/Program Prioritas	Nilai Skala Terhadap KriteriaKe-					Total Skor
		1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Penyusunan APBD dan Laporan Keuangan tepat waktu	5	5	4	4	5	23
2.	Mempertahankan capaian laporan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	5	5	4	4	4	22
3.	Peningkatan penilaian MCP KPK terhadap pengelolaan BMD	4	5	4	4	3	20

4.	Pengembangan SDM pejabat pengelola keuangan (penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan) melalui bimbingan teknis, rapat Koordinasi.	4	4	3	3	4	18
5.	Peningkatan kapasitas SDM pengurus barang secara terus menerus dan berkelanjutan	4	4	3	3	4	18
6.	Rekonsiliasi BMD setiap triwulan dan semester tepat waktu	3	3	3	3	4	16
7.	Penerbitan SP2D tepat waktu	2	2	2	2	3	11

Dari data-data diatas dapat dihitung total skor dan rata-rata skor dari hasil perkalian antara bobot kriteria dan skala prioritas seperti dalam tabel berikut:

Tabel 2.11
Perkalian Isu Strategis Terhadap Skala Prioritas

No	Isu Strategis	Nilai Skala Terhadap Kriteria Ke-					Total Skor	Rata-rata Skor
		1	2	3	4	5		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Penyusunan APBD dan Laporan Keuangan tepat waktu	150	100	80	60	75	465	93
2.	Mempertahankan capaian laporan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	150	100	80	60	60	450	90
3.	Peningkatan penilaian MCP KPK terhadap pengelolaan BMD	120	100	80	60	45	405	81
4.	Pengembangan SDM pejabat pengelola keuangan (penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan) melalui bimbingan teknis, rapat koordinasi, dll	120	80	60	45	60	365	73
5.	Peningkatan kapasitas SDM pengurus barang secara terus menerus dan berkelanjutan	120	80	60	45	60	365	73
6.	Rekonsiliasi BMD setiap triwulan dan semester tepat waktu	90	60	60	45	60	315	63
7.	Penerbitan SP2D tepat waktu	60	40	40	30	45	215	43

Dari hasil perhitungan total skor dan rata-rata skor diatas, maka dapat ditentukan skala prioritas yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan isu-isu strategis sesuai tabel berikut:

Tabel 2.12
Isu-isu Strategis

No	Isu Strategis	Skor
1.	Penyusunan APBD dan Laporan Keuangan tepat waktu	465
2.	Mempertahankan capaian laporan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	450
3.	Peningkatan penilaian MCP KPK terhadap pengelolaan BMD	405
4.	Pengembangan SDM pejabat pengelola keuangan (penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan) melalui bimbingan teknis, rapat koordinasi, dll	365
5.	Peningkatan kapasitas SDM pengurus barang secara terus menerus dan berkelanjutan	365
6.	Rekonsiliasi BMD setiap triwulan dan semester tepat waktu	315
7.	Penerbitan SP2D tepat waktu	215

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN dan SASARAN BPKAD

Tujuan dan sasaran BPKAD merupakan perumusan strategis yang memiliki prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja BPKAD selama periode 5 tahun (tahun 2025 s/d 2029) pada bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan tujuan akhir dalam mewujudkan Visi Kepala Daerah yaitu:

“KABUPATEN NUNUKAN YANG INOVATIF, SEJAHTERA, ADIL DAN MANDIRI”

Dalam mewujudkan visi tersebut ditetapkan 5 (lima) misi serta ditetapkan tujuan untuk setiap misi dan sasaran untuk setiap tujuan yang diharapkan dapat diwujudkan untuk kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Nunukan. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan dan petunjuk bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Misi yang selaras dengan pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan adalah Misi Ke 3 (Tiga) yaitu:

“PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN, MELAYANI, CEPAT DAN TUNTAS ”

Tujuan dan sasaran memiliki korelasi dengan pernyataan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh kepala daerah. Tujuan sebagai arah untuk merumuskan sasaran dan kebijakan. Sedang sasaran merupakan hasil nyata yang ingin dicapai oleh BPKAD dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Tujuan dan sasaran jangka menengah BPKAD disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
 TUJUAN DAN SASARAN BPKAD KABUPATEN NUNUKAN PERIODE 2025 S/D 2029

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan dan Keuangan	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Yang Transparan dan Akuntanbel		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
		Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Persentase SILPA Terhadap Belanja Daerah dan Persentase Laporan Keuangan Sesuai SAP	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya kinerja pengelolaan aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset	95	96	97	98	99	99	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat SAKIP	B	B	BB	BB	BB	BB	

3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Penentuan strategi untuk pencapaian tujuan melalui pencapaian setiap indikator kinerja sasaran setiap tahun dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan faktor eksternal dengan menggunakan Analisa SWOT, Analisa SWOT dilaksanakan dengan mengidentifikasi dan mempertimbangkan faktor-faktor internal yang menjadi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weaknes*) yang dijumpai didalam BPKAD dalam penyelenggaraan pelayanan pada aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah. Selain itu penentuan strategi juga mengidentifikasi dan mempertimbangkan faktor-faktor diluar BPKAD yang merupakan peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threasts*) dalam penyelenggaraan pelayanan pada aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah. Faktor-faktor kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dianalisa dengan metode SWOT. Dari hasil analisis tersebut akan menghasilkan arahan atau rekomendasi berupa strategi untuk mencapai tujuan BPKAD. Adapun analisis SWOT disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2 Faktor-faktor Internal Berupa Kekuatan dan Kelemahan BPKAD

FAKTOR INTERNAL	Strenghts (S)	Weaknesses (W)
	Terdapat peraturan sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Belum optimalnya pengelolaan keuangan dengan menggunakan aplikasi SIPD
	Terdapat sinergi yang baik antar pejabat dan seluruh pegawai yang ada dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.	Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah
	Telah dipergunakan sistem informasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah dari tahap penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	Belum optimalnya OPD dalam meyusun anggaran/RKA OPDdengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja atau kurang diperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan
	Tersedianya data, informasi, dokumen, pedoman, dan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Terdapat beberapa OPD dalam menyusun RKA tidak memperhatikan dokumen perencanaan, yaitu RENSTRA OPD dan Renja OPD yang berdampak ketidak sesuaian indikator kinerja dalam RKA OPD
	Realisasi belanja secara periodik pada OPD dapat dipergunakan sebagai salah satu indikator untuk menilai kinerja OPD	Penyerapan belanja daerah belum sesuai dengan alokasi anggaran belanja daerah yang diatur dalam anggaran kas, sehingga mengakibatkan penumpukan penyerapan pada akhir tahun anggaran.

Tabel 3.3 Faktor-faktor Eksternal Berupa Peluang dan Ancaman BPKAD

FAKTOR EKSTERNAL	Opportunities (O)	Threats (T)
	Komitmen Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk konsisten meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.	Aturan dari pemerintah pusat tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang sering mengalami perubahan dengan cepat
	Komitmen Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk mempertahankan Opini WTP atas LKPD Kabupaten Nunukan.	Belum optimalnya pelaksanaan inventarisasi aset tetap yang mengakibatkan data barang milik daerah belum akurat.
	Tuntutan pelayanan publik yang lebih profesional, cepat dan tepat dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.	Dalam melaksanakan kegiatan OPD tidak memperhatikan waktu pelaksanaan kegiatan sehingga berdampak pada penyerapan anggaran sehingga sebagian besar akan di realisasikan pada akhir tahun anggaran.
	Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat sehingga cukup membantu dalam collecting data, analisis, perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat.	Kurang tertibnya tata kelola aset daerah oleh OPD.

Dari identifikasi pada tabel 3.2 dan tabel 3.3 di atas dapat dibuat matriks untuk menentukan langkah strategi yang akan diambil oleh BPKAD dalam meningkatkan kinerja sebagaimana tabel berikut:

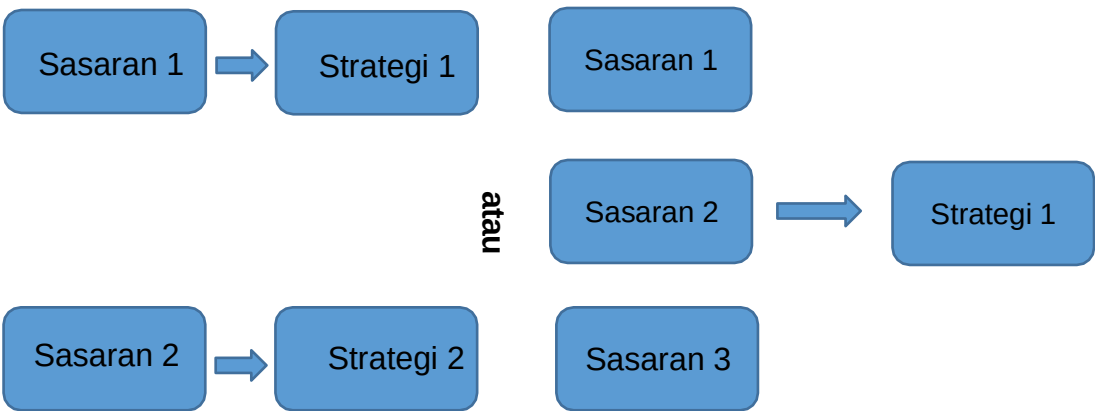
Tabel 3.4 Matrik SWOT Dalam Rangka Penentuan Strategi

Opportunities (O)	Strategis S - O	Strategis W - O
Komitmen Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk konsisten meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.	Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah	Aplikasi yang terintegrasi
Komitmen Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk mempertahankan Opini WTP atas LKPD Kabupaten Nunukan.	Meningkatkan kualitas SDM pengelola keuangan	Diklat/Bimtek tentang Pengelolaan keuangan dan aset daerah
Tuntutan pelayanan publik yang lebih profesional, cepat dan tepat dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.	Pemanfaatan teknologi dan aplikasi sistem dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah	Aplikasi yang terintegrasi
Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat sehingga cukup membantu dalam collecting data, analisis, perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat.	Integrasi teknologi informasi dalam perencanaan dan pengelolaan Keuangan Daerah	Aplikasi yang terintegrasi

Threats (T)	Strategis S-T	Strategis W - T
Aturan dari pemerintah pusat tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang sering mengalami perubahan dengan cepat	Meningkatkan kualitas SDM pengelola keuangan daerah dan pengelola barang milik daerah sehingga dapat merespon dengan cepat jika terdapat perubahan kebijakan pemerintah pusat.	Diklat/Bimtek Pengelola keuangan dan pengelola barang milik Daerah
Belum optimalnya pelaksanaan inventarisasi aset tetap yang mengakibatkan data barang milik daerah belum akurat.	Mengintegrasikan pengelolaan BMD dengan pemanfaatan teknologi informasi	Melaksanakan Entry data BMD secara tertip dan tepat waktu
Dalam melaksanakan kegiatan OPD tidak memperhatikan waktu pelaksanaan kegiatan sehingga berdampak pada penyerapan anggaran sehingga sebagian besar akan di realisasikan pada akhir tahun anggaran.	Meningkatkan kedisiplinan OPD dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaannya.	Komitmen kepala SKPD selaku pengguna/kuasa pengguna anggaran
Kurang tertibnya tata kelola aset daerah oleh OPD.	Meningkatkan kualitas SDM pengelola barang milik daerah	Diklat/Bimtek pengelolaan barang milik daerah

Dari analisis SWOT tersebut diatas selanjutnya ditetapkan suatu strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan- kebijakan dan program-program. Oleh karena itu BPKAD harus dengan tepat dalam memilih strategi, sebab ketepatan strategi yang dipilih sangat berpengaruh terhadap keberhasilan BPKAD dalam mencapai tujuan dan sasaran. Strategi dan arah kebijakan yang merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana cara OPD mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah dengan efektif dan efesien. Selain itu strategi memiliki manfaat sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Suatu strategi dapat secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau kelompok sasaran dengan kerangka logis sebagaimana bagan berikut :

Gambar 3.1 Keterkaitan Sasaran dengan Strategi



Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah BPKAD yang telah ditetapkan maka untuk mewujudkan hal tersebut maka pelaksanaannya akan dilaksanakan secara bertahap sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.5
PENAHAPAN RENSTRA BPKAD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pemantapan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel	Perwujudan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel	Mempertahankan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel

Dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan dalam RENSTRA BPKAD yang mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran lewat strategi yang telah ditetapkan berdasarka analisis SWOT maka kebijakan yang diambil untuk mewujudkan semua itu sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.6
ARAH KEBIJAKAN RENSTRA BPKAD

NO	OPERASIONALISASI	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN BPKAD	KET.
1	2	3	4	5
1	Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	Membangun dasar Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi; transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah	
2		Membangun dasar Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah.	Peningkatan Akuntabilitas Laporan Kinerja SKPD	
3			Peningkatan Legalitas Aset Daerah	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

4.1 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN

RENSTRA BPKAD Kabupaten Nunukan disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan 2025- 2029, Tujuan pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Nunukan Tahun 2025- 2029 yang tertuang dalam RPJMD untuk mewujudkan Misi ke 3 tersebut adalah **“Terwujudnya Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional”**. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah tersebut maka tujuan dan sasaran dari RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan adalah ***Terwujudnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Yang Transparan dan Akuntabel*** dengan indikator opini BPK yang didukung dengan tiga sasaran RENSTRA yakni ***Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah , Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Aset Daerah dan 1 sasaran penunjang Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*** dengan Indikator Sasaran yaitu Persentase SILPA Terhadap Belanja Daerah dan Persentase Laporan Keuangan Sesuai SAP, Persentase Penambahan Nilai Aset dan indikator sasaran penunjang Predikat SAKIP.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten Nunukan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu anggaran selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah BPKAD Kabupaten Nunukan. Indikator kinerja program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang pada prinsipnya berisi *outcome* program.

Dalam urusan wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Nunukan maka program prioritas yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 s/d 2029 adalah Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Aset Daerah dengan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan sesuai dengan yang berlaku. Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan beserta indikatornya akan dijabarkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4.2
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Akuntabilitas perencanaan dan keuangan	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Yang Transparan dan Akuntabel				Opini BPK		
		Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah			Persentase SILPA Terhadap Belanja Daerah dan Persentase Laporan Keuangan Sesuai SAP		
			Meningkatnya Tata Kelola Anggaran		Persentase Penganggaran Tepat Waktu	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
			Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan		Persentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu		
			Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan		Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu		
				Penyampaian KUA PPAS dan RAPBD Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Penganggaran yang disampaikan kepada DPRD tepat waktu	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
						Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	

						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
						Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	
						Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
						Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
						Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	
						Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	
						Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
				Penerbitan SP2D Tepat Waktu	Jumlah SP2D yang Terbit Tepat Waktu	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
						Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	
						Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	

						Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga (PFK)	
						Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	
						Pembinaan Penatausahaan Keuangan	
				Laporan Keuangan Yang Tepat Waktu	Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
						Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	
						Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
						Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	
						Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	

						Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	
				Realisasi Bantuan Keuangan dan BTT	Jumlah Anggran Bantuan Keuangan dan BTT Yang Terealisasi	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
						Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	
						Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	
				Laporan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	
						Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	
		Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Aset Daerah			Persentase Penambahan Nilai Aset		
			Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah		Prosentase kinerja administrasi pengelolaan Aset daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
				SKPD yang tertib tata kelola BMD	Prosentase SKPD yang tertib tata kelola BMD	Pengelolaan Barang Milik Daerah	

						Penyusunan Standar Harga	
						Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	
						Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	
						Penatausahaan Barang Milik Daerah	
						Inventarisasi Barang Milik Daerah	
						Pengamanan Barang Milik Daerah	
						Penilaian Barang Milik Daerah	
						Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	
						Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	
						Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
						Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
						Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	

		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah			Predikat SAKIP		
			Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Disusun Sesuai Aturan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	Prosentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Penggajian Pegawai Tepat Waktu	Prosentase penunjang kelancaran administrasi perkantoran	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Dokumen Administrasi Kepegawaian	Prosentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersusun	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Barang dan Jasa Kebutuhan Kantor	Prosentase penunjang kelancaran administrasi perkantoran	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang tersedia	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

					Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
					Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang tersedia	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Berikut akan dijabarkan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan yang akan dilaksanakan oleh BPKAD selama satu periode perencanaan kedepan sebagai berikut:

Tabel 4.3
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN

Bidan g Urusa n	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (sigma output) Sub Kegiatan	Data Capaia n pada Tahun Awal Perenc anaan 2024	Target Kinerja dan Pendanaan												Ket.
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
KEUA NGAN	PROGRAM PENGELOLA AN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penganggar an tepat Waktu	100%													Kab. Nun ukan
		Persentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu	100%													Kab. Nun ukan
		Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	100%	318.685.893 .982	100 %	235.738.118.64 0	100 %	242.976.825.423	100 %	250.742.107.661	100 %	259.008.878.981	100 %	298.253.547.79 5	Kab. Nun ukan
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penyampaia n RAPBD kepada DPRD tepat waktu	100%	100%	2.505.162.18 0	100 %	5.397.000.000	100 %	5.450.970.000	100 %	5.505.479.700	100 %	5.560.534.497	100 %	5.616.139.842	Kab. Nun uka n

	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	100%	2 Dokumen	37.370.235	2 Dokumen	220.000.000	2 Dokumen	222.200.000	2 Dokumen	224.422.000	2 Dokumen	226.666.220	2 Dokumen	228.932.882	Kab. Nunukan
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	100%	2 Dokumen	97.734.500	2 Dokumen	354.000.000	2 Dokumen	357.540.000	2 Dokumen	361.115.400	2 Dokumen	364.726.554	2 Dokumen	368.373.820	Kab. Nunukan
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi	0%	NA	0%	51 Dokumen	175.000.000	51 Dokumen	176.750.000	51 Dokumen	178.517.500	51 Dokumen	180.302.675	51 Dokumen	182.105.702	Kab. Nunukan
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi	0%	NA	0%	51 Dokumen	175.000.000	51 Dokumen	176.750.000	51 Dokumen	178.517.500	51 Dokumen	180.302.675	51 Dokumen	182.105.702	Kab. Nunukan
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	0%	NA	0%	51 Dokumen	175.000.000	51 Dokumen	176.750.000	51 Dokumen	178.517.500	51 Dokumen	180.302.675	51 Dokumen	182.105.702	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	0%	NA	0%	51 Dokumen	175.000.000	51 Dokumen	176.750.000	51 Dokumen	178.517.500	51 Dokumen	180.302.675	51 Dokumen	182.105.702	

	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	100%	2 Dokumen	974.266.420	2 Dokumen	1.027.000.000	2 Dokumen	1.037.270.000	2 Dokumen	1.047.642.700	2 Dokumen	1.058.119.127	2 Dokumen	1.068.700.318	Kab. Nunukan
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	100%	2 Dokumen	894.587.000	2 Dokumen	1.190.000.000	2 Dokumen	1.201.900.000	2 Dokumen	1.213.919.000	2 Dokumen	1.226.058.190	2 Dokumen	1.238.318.772	Kab. Nunukan
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serat kebijakan bidang anggaran	100%	1 Dokumen	90.587.105	1 Dokumen	362.000.000	1 Dokumen	365.620.000	1 Dokumen	369.276.200	1 Dokumen	372.968.962	1 Dokumen	376.698.652	Kab. Nunukan

	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	100%	6 Dokumen	148.164.390	6 Dokumen	670.000.000	6 Dokumen	676.700.000	6 Dokumen	683.467.000	6 Dokumen	690.301.670	6 Dokumen	697.204.687	Kab. Nunukan
	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan penganggaran daerah pemerintah kab./kota	100%	51 Orang	262.452.530	51 Orang	874.000.000	51 org	882.740.000	51 org	891.567.400	51 org	900.483.074	51 org	909.487.905	Kab. Nunukan
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Prosentase rata-rata realisasi belanja SKPD	82%	83%	563.663.570	85%	1.413.000.000	88%	1.554.300.000	91%	1.709.730.000	94%	1.880.703.000	95%	2.068.773.300	Kab. Nunukan
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah	100%	1000 Dokumen	76.424.465	120 Dokumen	143.000.000	120 Dokumen	157.300.000	120 Dokumen	173.030.000	120 Dokumen	190.333.000	120 Dokumen	209.366.300	Kab. Nunukan
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	100%	204 Dokumen	98.353.515	200 Dokumen	100.000.000	200 Dokumen	110.000.000	200 Dokumen	121.000.000	200 Dokumen	133.100.000	200 Dokumen	146.410.000	Kab. Nunukan

	Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/ pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK)	Jumlah laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/ pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK)	100%	250 Dokum en	192.178.560	250 Dok ume n	250.000.000	250 Dok ume n	275.000.000	250 Dok ume n	302.500.000	250 Dok ume n	332.750.000	250 Dok ume n	366.025.000	Kab. Nun ukan
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	100%	5.000 Dokum en	98.353.515	8.00 0 Dok ume n	691.000.000	8.00 0 Dok ume n	760.100.000	8.00 0 Dok ume n	836.110.000	5.00 0 Dok ume n	919.721.000	5.00 0 Dok ume n	1.011.693.100	Kab. Nun ukan

	Pembinaan Penatausahaan Keuangan	Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan penatausahaan keuangan	100%	51 Orang	98.353.515	51 Orang	229.000.000	51 Orang	251.900.000	51 Orang	277.090.000	51 Orang	304.799.000	51 Orang	335.278.900	Kab. Nunukan
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Prosentase SKPD yang menyusun LK tepat waktu	100%	100%	821.273.175	100 %	1.938.000.000	100 %	1.976.760.000	100 %	1.996.527.600	100 %	2.016.492.876	100 %	2.036.657.805	
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulan dan semesteran	100%	18 Laporan	127.868.160	18 Laporan	354.000.000	18 Laporan	361.080.000	18 Laporan	364.690.800	18 Laporan	368.337.708	18 Laporan	372.021.085	Kab. Nunukan
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah yang terkonsolidasi	100%	1 Laporan	278.355.595	1 Laporan	684.000.000	1 Laporan	697.680.000	1 Laporan	704.656.800	1 Laporan	711.703.368	1 Laporan	718.820.402	Kab. Nunukan

	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100%	2 Dokumen	194.400.920	2 Laporan	453.000.000	2 Laporan	462.060.000	2 Laporan	466.680.600	2 Laporan	471.347.406	2 Laporan	476.060.880	Kab. Nunukan
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	100%	2 Dokumen	128.852.500	2 Dokumen	350.000.000	2 Dokumen	357.000.000	2 Dokumen	360.570.000	2 Dokumen	364.175.700	2 Dokumen	367.817.457	Kab. Nunukan

	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kab./kota	100%	38 orang	91.796.000	51 Orang	97.000.000	51 Orang	98.940.000	51 Orang	99.929.400	51 Orang	100.928.694	51 Orang	101.937.981	Kab. Nunukan
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase rata-rata realisasi belanja bantuan keuangan dan BTT	100%	100%	314.686.859.057	100%	226.604.118.640	100%	233.604.935.423	100%	241.136.611.761	100%	249.153.452.422	100%	288.130.303.700	Kab. Nunukan
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	100%	1 Laporan	295.821.500.353	1 Laporan	207.739.118.640	1 Laporan	212.853.435.423	1 Laporan	218.309.961.761	1 Laporan	224.044.137.422	1 Laporan	260.510.057.200	Kab. Nunukan
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	100%	1 Laporan	18.865.358.704	1 Laporan	18.865.000.000	1 Laporan	20.751.500.000	1 Laporan	22.826.650.000	1 Laporan	25.109.315.000	1 Laporan	27.620.246.500	Kab. Nunukan

	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100%	100%	108.936.000	1 Laporan	386.000.000	1 Laporan	389.860.000	1 Laporan	393.758.600	1 Laporan	397.696.186	1 Laporan	401.673.148	Kab. Nunukan
	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil implementasi pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	100%	1 Dokumen	108.936.000	1 Dokumen	386.000.000	1 Dokumen	389.860.000	1 Dokumen	393.758.600	1 Dokumen	397.696.186	1 Dokumen	401.673.148	Kab. Nunukan
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	80%	80%	2.021.953.261	85%	2.059.000.000	90%	2.105.178.485	95%	2.125.454.792	96%	2.144.307.968	98%	2.171.729.930	Kab. Nunukan
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prosentase SKPD yang tertib tata kelola BMD	70%	70%	2.021.953.261	75%	2.059.000.000	80%	2.091.110.000	85%	2.124.693.100	90%	2.145.940.031	95%	2.167.399.431	Kab. Nunukan
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standar Harga yang disusun	100%	1 Dokumen	247.747.465	1 Dokumen	190.000.000	1 Dokumen	191.900.000	1 Dokumen	193.819.000	1 Dokumen	195.757.190	1 Dokumen	197.714.762	Kab. Nunukan

	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah yang disusun	100%	1 Dokumen	1	1 Dokumen	93.000.000	1 Dokumen	102.300.000	1 Dokumen	112.530.000	1 Dokumen	113.655.300	1 Dokumen	114.791.853	Kab. Nunukan
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan BMD yang disusun	100%	5 Dokumen	0	5 Dokumen	90.000.000	5 Dokumen	90.900.000	5 Dokumen	91.809.000	5 Dokumen	92.727.090	5 Dokumen	93.654.361	Kab. Nunukan
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang disusun	100%	1 Dokumen	0	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.750.000	1 Dokumen	76.507.500	1 Dokumen	77.272.575	1 Dokumen	78.045.301	Kab. Nunukan
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	100%	2 Laporan	365.819.995	2 Laporan	167.000.000	2 Laporan	168.670.000	2 Laporan	170.356.700	2 Laporan	172.060.267	2 Laporan	173.780.870	Kab. Nunukan
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil inventaris (LHI) BMD	100%	0	0	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	60.600.000	1 Laporan	61.206.000	1 Laporan	61.818.060	1 Laporan	62.436.241	Kab. Nunukan
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	100%	2 Laporan	377.638.760	2 Laporan	565.000.000	2 Laporan	570.650.000	2 Laporan	576.356.500	2 Laporan	582.120.065	2 Laporan	587.941.266	Kab. Nunukan
	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	100%	1 Laporan	85.930.100	30 Laporan	90.000.000	35 Laporan	90.900.000	40 Laporan	91.809.000	45 Laporan	92.727.090	50 Laporan	93.654.361	Kab. Nunukan

	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	2 Laporan	13.536.050	2 Laporan	35.000.000	2 Laporan	38.500.000	2 Laporan	42.350.000	2 Laporan	42.773.500	2 Laporan	43.201.235	Kab. Nunukan
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtan ganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan , Pemindahtan ganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	100%	51 Laporan	506.525.890	50 Laporan	218.000.000	50 Laporan	220.180.000	50 Laporan	222.381.800	50 Laporan	224.605.618	51 Laporan	226.851.674	Kab. Nunukan
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100%	2 Laporan	62.363.000	2 Laporan	99.000.000	2 Laporan	99.990.000	2 Laporan	100.989.900	2 Laporan	101.999.799	2 Laporan	103.019.797	Kab. Nunukan
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	100%	10 Laporan	362.392.000	10 Laporan	242.000.000	10 Laporan	244.420.000	10 Laporan	246.864.200	10 Laporan	249.332.842	10 Laporan	251.826.170	Kab. Nunukan

	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan pengelolaan BMD pemerintah Kabupaten/Kota	100%	51 Orang	0	50 Orang	135.000.000	50 Orang	136.350.000	50 Orang	137.713.500	51 Orang	139.090.635	51 Orang	140.481.541	Kab. Nunukan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA	Prosentase penunjang urusan pemerintah daerah yang disusun sesuai aturan	100%	1	16.979.261.737	100 %	17.442.540.991	100 %	17.708.673.768	100 %	17.879.237.218	100 %	18.037.829.343	100 %	18.268.501.750	Kab. Nunukan
	Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100%	100%	24.909.200	100 %	65.000.000	100 %	71.500.000	100 %	78.650.000	100 %	86.515.000	100 %	95.166.500	Kab. Nunukan
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	100%	2 Dokumen	9.573.300	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	33.000.000	2 Dokumen	36.300.000	2 Dokumen	39.930.000	2 Dokumen	43.923.000	Kab. Nunukan

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	6	15.335.900	6 Laporan	35.000.000	6 Laporan	38.500.000	6 Laporan	42.350.000	6 Laporan	46.585.000	6 Laporan	51.243.500	Kab. Nunukan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase penunjang kelancaran administrasi perkantoran	100%	100%	14.774.264.925	100%	13.500.000.000	100%	13.600.000.000	100%	13.700.000.000	100%	13.800.000.000	100%	13.900.000.000	Kab. Nunukan
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100%	68 Orang	14.774.264.925	68 Orang	13.500.000.000	68 Orang	13.600.000.000	68 Orang	13.700.000.000	68 Orang	13.800.000.000	68 Orang	13.900.000.000	Kab. Nunukan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersusun	100%	100%	0	100%	150.000.000	100%	165.000.000	100%	181.500.000	100%	199.650.000	100%	219.615.000	Kab. Nunukan
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	100%	0	0	0	150.000.000	100 Orang	165.000.000	100 Orang	181.500.000	100 Orang	199.650.000	100 Orang	219.615.000	Kab. Nunukan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase penunjang kelancaran administrasi perkantoran	100%	100%	631.718.330	100%	786.000.000	100%	864.600.000	100%	951.060.000	100%	1.046.166.000	100%	1.150.782.600	Kab. Nunukan

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	1 Paket	29.324.900	1 Paket	30.000.000	1 Paket	33.000.000	1 Paket	36.300.000	1 Paket	39.930.000	1 Paket	43.923.000	Kab. Nunukan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	100%	1 Paket	376.182.000	1 Paket	404.000.000	1 Paket	444.400.000	1 Paket	488.840.000	1 Paket	537.724.000	1 Paket	591.496.400	Kab. Nunukan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang tersedia	100%	1 Paket	53.130.510	1 Paket	81.000.000	1 Paket	89.100.000	1 Paket	98.010.000	1 Paket	107.811.000	1 Paket	118.592.100	Kab. Nunukan
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	100%	1 Paket	14.044.470	1 Paket	23.000.000	1 Paket	25.300.000	1 Paket	27.830.000	1 Paket	30.613.000	1 Paket	33.674.300	Kab. Nunukan
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	2 Laporan	77.966.350	2 Laporan	78.000.000	2 Laporan	85.800.000	2 Laporan	94.380.000	2 Laporan	103.818.000	2 Laporan	114.199.800	Kab. Nunukan

	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	20 Laporan	110.395.000	20 Laporan	170.000.000	20 Laporan	187.000.000	20 Laporan	205.700.000	20 Laporan	226.270.000	20 Laporan	248.897.000	Kab. Nunukan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	1.376.569.952	100%	1.375.000.000	100%	1.512.500.000	100%	1.663.750.000	100%	1.830.125.000	100%	2.013.137.500	Kab. Nunukan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	100%	3 Laporan	286.500.000	3 Laporan	286.000.000	3 Laporan	314.600.000	3 Laporan	346.060.000	3 Laporan	380.666.000	3 Laporan	418.732.600	Kab. Nunukan
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	100%	1 Laporan	44.900.000	1 Laporan	44.000.000	1 Laporan	48.400.000	1 Laporan	53.240.000	1 Laporan	58.564.000	1 Laporan	64.420.400	Kab. Nunukan

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	100%	1 Laporan	1.045.169.952	1 Laporan	1.045.000.000	1 Laporan	1.149.500.000	1 Laporan	1.264.450.000	1 Laporan	1.390.895.000	1 Laporan	1.529.984.500	Kab. Nunukan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100%	100%	171.799.330	100%	397.000.000	100%	436.700.000	100%	480.370.000	100%	528.407.000	100%	581.247.700	Kab. Nunukan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	19 Unit	66.799.330	19 Unit	92.000.000	19 Unit	101.200.000	19 Unit	111.320.000	19 Unit	122.452.000	19 Unit	134.697.200	Kab. Nunukan
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara	100%	1 Unit	105.000.000	1 Unit	305.000.000	1 Unit	335.500.000	1 Unit	369.050.000	1 Unit	405.955.000	1 Unit	446.550.500	Kab. Nunukan

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan	0%	0	0	100 %	200.000.000	100 %	220.000.000	100 %	242.000.000	100 %	266.200.000	100 %	292.820.000	Kab. Nunukan
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang tersedia	0%	0	0	1 Unit	200.000.000	1 Unit	220.000.000	1 Unit	242.000.000	1 Unit	266.200.000	1 Unit	292.820.000	Kab. Nunukan

Tabel 4.4

DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
		Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	
		Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	
			Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	
			Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	
			Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga (PFK)	
			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	
			Pembinaan Penatausahaan Keuangan	

			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
			Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	
			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	
			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	
			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	
			Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	
			Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	
			Penyusunan Standar Harga	
			Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	
			Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah	
			Inventarisasi Barang Milik Daerah	
			Pengamanan Barang Milik Daerah	
			Penilaian Barang Milik Daerah	
			Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	
			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	
			Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	

			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
			Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	

Dari Tabel Tabel 4.3 tentang Program pembangunan yang akan dilaksanakan dapat kita lihat bahwa dalam periode 2025 s/d 2029 ada 3 (tiga) Program, 12 (dua belas) Kegiatan, dan 67 (enam puluh tujuh) sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan. Seluruh Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan ini saling mendukung untuk mewujudkan tujuan Utama dari RENSTRA BPKAD yakni *Terwujudnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Yang Transparan dan Akuntabel*.

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berkaitan dengan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut diatas, maka dipandang perlu ditetapkan indikator kinerja program dan kegiatan, yang tujuannya untuk mengevaluasi hasil kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan telah sejalan dengan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Tujuan dan sasaran dari program kegiatan yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan tidak terkait secara langsung dengan agenda pembangunan Kabupaten Nunukan. Namun dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah hanya berfungsi sebagai pendukung program-program pembangunan tersebut dengan meningkatkan penerimaan pendapatan daerah secara optimal dan berkelanjutan serta pengelolaan keuangan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel demi terciptanya kredibilitas, keterbukaan dan keandalan sistem manajemen keuangan daerah.

Sasaran dari program kegiatan yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dituangkan menjadi kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin. Program dan kegiatan dimaksud sejalan dengan tujuan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Nunukan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nunukan yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai BPKAD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Hal ini bisa diperhatikan kembali pada tabel berikut :

Tabel 4.5
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BPKAD

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Opini BPK RI	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Tujuan
2	Prosentase kinerja pengelolaan keuangan daerah tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	Sasaran 1
3	Prosentase kinerja administrasi pengelolaan Aset daerah	%	95	96	97	98	99	99	Sasaran 2
4	Predikat SAKIP	Predikat	B	B	BB	BB	BB	BB	Sasaran 3

Tabel 4.6
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) BPKAD

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	IKK OUTCOME	SATUAN	TARGET TAHUNAN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10
1	Fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan dan Keuangan	Rasio belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan	Persentase	11	10	10	10	10	10	%
		Rasio Pendapatan Asli Daerah	Persentase	7	7,5	8	8,5	9	9,5	%
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum dikurangi transfer ekspenditure	Persentase	52	51,5	51	50,5	50	49,5	%

		Opini Laporan Keuangan	Laporan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
2	Fungsi penunjang urusan pemerintahan Manajemen Keuangan	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persentase	-1,5	-1,3	-1,2	-1,1	-1,0	-0,9	%
		Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persentase	5	4	3	2	1	1	%
		Manajemen Asset	Laporan	100	100	100	100	100	100	
		Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persentase	17	16	15	14	13	12	%

BAB V

P E N U T U P

Revisi Rancangan Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025 s/d 2029 disusun dengan mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 s/d 2029. Melalui dokumen tersebut akan menjadi pedoman dan arahan yang jelas bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nunukan selama kurun waktu 5 (lima) tahun (2025 s/d 2029) dalam menyelenggarakan pelayanan Pemerintah Daerah pada aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan urusan yang ditangani. Keberhasilan atau kegagalan pelayanan yang diselenggarakan dapat diukur dengan tercapai atau tidaknya indikator kinerja dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai indikator kinerja utama dan indikator kinerja (*outcome*) dari program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi kepalah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan.

Dokumen perencanaan daerah periode tahun 2025 s/d 2029 yang telah ditetapkan untuk menjadi pedoman bagi Seluruh organisasi Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Kabupaten Nunukan dalam melaksanakan kebijakan dan program dengan sebaik-baiknya. Selain itu Organisasi perangkat Daerah juga berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan, Lokasi, capaian kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah yang di susun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 s/d 2029.